



Radar Bali

seperti itu," ungkapkannya.

Suantar mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan memungkinkan Pemkab Klungkung untuk menarik retribusi dari kegiatan bongkar/muat hewan ternak. Namun selama ini Pemkab Klungkung melalui UPT Pelabuhan Nusa Penida belum pernah melakukan penarikan retribusi. "Laporan Kepala UPT Pelabuhan Nusa Penida Dewa Gede Bagus Suarmahendra mengungkapkan ada dugaan pungli berkaitan dengan itu. Namun untuk membuktikan ini harus ada pansus (panitia khusus)," terangnya.

Kepala UPT Pelabuhan Nusa Penida Dewa Gede Bagus Suarmahendra saat dikonfirmasi terpisah mengungkapkan, retribusi dari kegiatan bongkar/muat hewan ternak beberapa bulan lalu pernah dipertanyakan dewan. Pihaknya sudah diperintahkan Dinas Perhubungan untuk menerap-

kannya. Namun saat Perda itu akan diterapkan, ada salah seorang anggota kelompok ternak yang tidak mau membayar. Alasan karena anggota kelompok ternak itu sudah membayar Rp 50 ribu per truk saat di pelabuhan. Tidak berhenti di sana, anggota kelompok ternak itu mengaku juga membayar sebesar Rp 75 ribu per truk saat berada di dalam kapal. "Untuk pembayaran di dalam kapal, katanya untuk biaya kebersihan kapal. Kondisi ini kami sudah sampaikan ke dinas dan oleh dinas kami disuruh untuk menelusuri," tandasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Nyoman Sucitra saat dihubungi mengaku telah mengetahui hal itu sejak sebulan yang lalu. Pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan penelusuran bersama ke lapangan. "Kami masih tunggu waktu untuk bisa bersama-sama melakukan penelusuran," tutup Sucitra. (ayu/dot)

Edisi : Jumat, 3 Agustus 2018

Hal : 2



Ada Pungli di Pelabuhan Nusa Penida?

Dewan Akui Ada Indikasi

SEMARAPURA- Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Nusa Penida-Padangbai menggunakan Kapal Roro (roll on-roll off) Nusa Jaya Abadi kembali mendapat sorotan. Jika sebelumnya layanan kapal Roro disorot lantaran batal berlayar akibat kelebihan muatan dan tidak mengembalikan uang para penumpangnya. Kali ini sorotan terkait dugaan pungutan liar (pungli) retribusi jasa pelayanan kegiatan bongkar muat hewan ternak.

Hal ini terungkap saat anggota Komisi II DPRD Klungkung yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru melakukan sidak ke Pelabuhan Nusa Penida, Kamis (2/8) kemarin. Ketua Komisi II DPRD Klungkung, Komang Suantara saat dihubungi setelah menggelar sidak mengungkapkan, sidak itu digelar bertujuan untuk mengetahui tindak lanjut dari rapat kerja yang digelar beberapa waktu lalu berkaitan dengan peristiwa batalnya



Laporan Kepala UPT Pelabuhan Nusa Penida Dewa Gede Bagus Suarmahendra mengungkapkan ada dugaan pungli berkaitan dengan itu. Namun untuk membuktikan ini harus ada pansus (panitia khusus)."

I WAYAN BARU
Ketua DPRD Klungkung

kegiatan penyeberangan dari Pelabuhan Nusa Penida-Padangbai menggunakan Kapal Roro Nusa Jaya Abadi akibat kelebihan muatan dan adanya penumpang yang masuk kapal tanpa membeli tiket. Namun dalam sidak itu, ternyata terungkap bahwa ada dugaan pungutan liar retribusi jasa pelayanan kegiatan bongkar atau muat hewan ternak di Pelabuhan Nusa Penida dan di dalam kapal tersebut. "Iya ada indikasi

Edisi : Jumat, 3 Agustus 2018

Hal : 2



Ketika Gedung DPRD Kota Denpasar Suwung Ditinggal Anggota Dewan Pakai Uang Rakyat, Undangan

“Pelesiran” ke Luar Negeri dan Ke Luar Daerah

KBRI sebagai Alasan

Enak sekali jadi anggota DPRD Kota Denpasar. Selain penghasilan yang besar, dari gaji, berbagai tetek bengek tunjangan puluhan juta rupiah, juga bisa “pelesiran” berkedok kunjungan kerja ke luar kota maupun luar negeri.

GEDUNG DPRD Kota Denpasar di Jalan Melati Nomor 17 kini tampak megah. Maklum, dalam beberapa tahun ini, gelontoran dana miliar masuk gedung ini. dari hal remeh mempercantik tembok penyengker dangapura masuk gedung tersebut. Selain itu, bangunan gedungnya juga diperbesar melalui renovasi ruang sidang.

Kemarin, gedung itu sangat sepi. Hanya ada satu mobil yang terparkir. Petugas keamanan pun menghampiri dan mengatakan bahwa tidak ada agenda dewan. Sehingga, pantas saja kantor menjadi sepi. “Tidak ada siapa-siapa. Mau cari siapa? Kantor sepi tidak ada agenda,” ucapnya.

Sekretaris DPRD Kota Denpasar, Putu Gede Dharma Wiyasa saat dikonfirmasi kemarin pun mengakui, bahwa



NI KADEK NOVI FEBRIANI/RADAR BALI

SUWUNG : Kantor DPRD Kota Denpasar tampak sepi kemarin karena ditinggal kunker oleh para dewan, Kamis kemarin (2/8)

Selasa 2 Agustus kemarin memang tidak ada agenda di Kantor DPRD Kota Denpasar. Dia menjelaskan, para anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja.

Putu Dharma pun membenarkan ada kunjungan ke Moskow, Rusia. Namun, yang ke Moskow hanya pimpinan DPRD saja, dari Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Fraksi. Selain itu, untuk dewan yang lainnya ada kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur.

“Ya hari ini dewannya ada kunker ke Sidoarjo. Yang ke Moskow para pimpinannya saja, yang tidak ke Moskow ya ke Sidoarjo,” ucapnya.

Soal ke Moskow, Dharma mengakui ini agenda pemerintahan. Dengan begitu, pembiayaannya ditanggung oleh uang rakyat yang tercantum dalam APBD Kota Denpasar. Kata dia, DPRD Kota Denpasar turut ke Moskow lantaran ada undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow. Untuk penjelasan lebih lanjut, dia meminta koran ini langsung mengonfirmasi ke pimpinan dewan.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira

mengakui ikut ke Moskow saat dihubungi koran ini melalui aplikasi *Whatsapp*. Politikus Partai Golkar ini mengatakan, kunjungan itu untuk memenuhi undangan KBRI Moskow, karena dalam rangka Indonesian Festival.

“Ya, Kami ada kunjungan ke Moskow karena ada diundang oleh Kedutaan dalam rangka Indonesian Festival,” balasnya.

Mengenai berapa biaya dan uang saku ke Moskow, tidak ada penjelasan dari Mariana maupun Dharma meski sudah ditanyakan. Meski demikian, menurut Perwali Kota Denpasar Nomor 37 tahun 2015, dalam perjalanan keluar negeri untuk anggota DPRD, semua biaya ditanggung dari uang transportasi, akomodasi, makan, hingga uang saku. Fasilitas yang didapatkan untuk pimpinan DPRD sama dengan wali kota, sedangkan anggota Dewan setara dengan pejabat eselon II. Dalam Perwali tersebut, bila perjalanan dinas itu ke Rusia, maka per pimpinan DPRD akan mendapat uang harian (saku) USD556 atau setara Rp7,8 juta per hari (kurs USD1=Rp14 ribu). Sedangkan untuk anggota dewan USD 512 atau setara Rp7,1 juta per hari. (ni kadek novi febriani/yor)